

***Entrepreneurial Government* Pada Pemerintahan Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung**

Entrepreneurial Government in the Administration of Lower Cibiru Village, Cileunyi Subdistrict, Bandung District

Tati¹, Feny Febriyanti², Yantsa Kahfi Latifah³

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Sosial Humaniora, Universitas Muhammadiyah
Bandung

*Coressponding author: tati@umbandung.ac.id, febriantyfeny@gmail.com,
yantsakahfilatifah@gmail.com

Abstrak

Konsep *entrepreneurial government* dalam konteks pemerintahan daerah menjadi sangat relevan untuk diadopsi dalam pola pikir aparat pemerintah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah memberikan ruang yang luas bagi penerapan pendekatan baru dalam mengelola pemerintahan dengan cara yang efisien, efektif, responsif, dan transparan terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini juga berlaku untuk Desa Cibiru Hilir di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, yang merupakan salah satu pemerintahan di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi bagaimana konsep *entrepreneurial government* diterapkan dalam pemerintahan Desa Cibiru Hilir. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini sebanyak tujuh orang yang ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* sementara untuk validitas data menggunakan teknik triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *entrepreneurial government* di pemerintahan Desa Cibiru Hilir belum terlaksana secara optimal ditinjau dari aspek *customer oriented*, efisiensi pengelolaan anggaran, responsif, kompetitif, dan inovasi/kreatif. Temuan ini memberikan pandangan mendalam tentang tantangan dan potensi dalam menerapkan konsep *entrepreneurial government* di tingkat pemerintahan desa, yang dapat menjadi pedoman praktis bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kata kunci: *Entrepreneurial Government*, Kebijakan Publik, Pemerintahan Desa

Abstract

The concept of entrepreneurial government in the context of local governance is highly relevant to be adopted in the mindset of government officials. Law Number 23 of 2014 concerning Regional Governments provides ample room for the application of new approaches in managing governance efficiently, effectively, responsively, and transparently towards the needs of the community. This also applies to Desa Cibiru Hilir in the Cileunyi District, Bandung Regency, which is one of the local governments. This research aims to investigate how the concept of entrepreneurial government is applied in the governance of Desa Cibiru Hilir. The research method used is qualitative research.

Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The informants in this study were seven people selected using purposive sampling technique, while data validity used triangulation data technique. The research findings indicate that the implementation of entrepreneurial government in the governance of Desa Cibiru Hilir has not been optimally carried out in terms of customer orientation, budget management efficiency, responsiveness, competitiveness, and innovation/creativity. These findings provide a deeper understanding of the challenges and potentials in implementing the concept of entrepreneurial government at the village government level, which can serve as a practical guideline for village governments to improve the quality of public services.

Keywords: *Entrepreneurial Government, Public Policy, Village Government*

Pendahuluan

Di era globalisasi yang semakin meluas, dinamika masyarakat dan perubahan dalam kebutuhan serta tuntutan yang semakin kompleks menjadi hal yang tidak terhindarkan. Pola kerja konvensional, baik di sektor swasta maupun publik, semakin dihadapkan pada kenyataan bahwa metode-metode tersebut mulai ketinggalan zaman dan tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terutama bagi organisasi publik, tuntutan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi semakin meningkat. Peran pemerintah dalam konteks ini tidak hanya sebagai regulator dan penyedia layanan publik, tetapi juga sebagai katalisator untuk inovasi, fasilitator bagi perkembangan masyarakat, serta sebagai pemberdaya yang membantu masyarakat memanfaatkan potensi mereka secara maksimal. Dengan demikian, peran pemerintah dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks dari tahun ke tahun (Danil & Munjin, 2020).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa pada zaman otonomi daerah, pemerintah pusat membagi dan mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pemerintah daerah. Pejabat di pemerintah daerah diharapkan memiliki kreativitas, mandiri, dan inovasi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Tujuan dari penerapan otonomi daerah adalah untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, dengan tujuan akhir menciptakan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, dan adil (Ubaidillah, 2016). Dengan ini perlu adanya penerapan *entrepreneurial government* di dalam pemerintah daerah.

Entrepreneurial dalam konteks pemerintahan adalah pendekatan atau proses yang diterapkan untuk menciptakan inovasi, kemajuan, dan penyegaran dalam sektor publik. Seorang entrepreneur dalam lingkungan pemerintahan diinterpretasikan sebagai cara atau gaya dalam mengelola administrasi pemerintah. Pendekatan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi pemerintah dalam menyediakan layanan yang memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat (Niode, 2014).

(David Osborne, 1996) Dalam karya monumentalnya "*Reinventing Government, How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector,*"

penulis berusaha untuk mengubah pandangan tentang peran pemerintah dengan memperkenalkan konsep "pemerintahan yang berjiwa wirausaha" (*Entrepreneurial Government*). Konsep Reinventing Government mengusulkan bahwa pemerintahan dapat dijalankan dengan semangat wirausaha sehingga dapat memenuhi kebutuhan birokrasi secara lebih efektif. Tujuannya adalah untuk membangkitkan sikap dan perilaku birokrasi yang inovatif, adaptif, dan terkendali oleh birokrasi itu sendiri, sehingga pemerintah dapat lebih berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat (Fatikha, 2016). Poin krusial dari pemikiran Osborne dan Gaebler terkait dengan pergeseran paradigma dalam birokrasi pemerintahan, yang tidak lagi terfokus pada sentralisasi, strukturalisme, formalisme, dan apatis. Sebaliknya, fokusnya kini bergeser pada desentralisasi, pemberdayaan, kemitraan, fungsionalisasi, dan demokratisasi. Tujuannya adalah agar negara dapat berkembang lebih cepat dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan yang memuaskan. Dari sudut pandang ini, muncul keyakinan bahwa pemerintahan tidak dapat disamakan dengan sektor swasta karena tujuan dan orientasinya sangat berbeda. Sementara sektor pemerintah berusaha untuk memberikan layanan publik untuk kesejahteraan masyarakat, sektor swasta lebih fokus pada mencari keuntungan finansial (Supriyadi, 2021).

Keterlibatan *entrepreneurial* dalam sektor publik dan pemerintah dipicu oleh pengenalan terhadap potensi praktik administratif yang terbukti berhasil di sektor bisnis, dan dianggap dapat diterapkan dalam organisasi publik dan lembaga pemerintahan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengubah arah organisasi publik yang dianggap memiliki kinerja rendah (Purnomo & Padjadjaran, 2019).

Tantangan utama dalam menerapkan semangat wirausaha di pemerintah daerah sebagian besar terletak pada dinamika internal instansi pemerintah itu sendiri. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana birokrasi mampu merespons perubahan, baik yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal, serta sejauh mana pemerintah daerah berupaya menerapkan semangat wirausaha dalam sektor publik dan mengelola perubahan yang terjadi. Langkah-langkah yang sesuai harus diambil untuk mengatasi tantangan ini (Aryfadi, 2020).

Saat ini, kondisi empiris birokrasi mengalami perubahan, namun perubahannya bersifat involutif, yang berarti ada perubahan tetapi tanpa adanya kemajuan yang signifikan. Birokrasi saat ini masih terdampak oleh patologi birokrasi (Aryfadi, 2020). Kondisi inilah kemudian, perlu dibincangkan dan perlu adanya perubahan lingkungan dan peningkatan kebutuhan masyarakat karena hal ini adalah sebuah tuntutan dalam sebuah pelayanan pemerintah yang harus lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, ide *entrepreneurial government* yang dilontarkan Osborne dan Gaebler (1992:1995) menjadi suatu hal yang harus diterapkan. Dalam hal ini, birokrat dituntut untuk berpikir dan bertindak seperti *entrepreneurial government*.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, pemerintahan Desa Cibiru Hilir memiliki banyak inovasi sehingga menjadi salah satu Desa terbaik di

Kabupaten Bandung. Dengan hal ini bahwa Desa Cibiru Hilir telah menerapkan birokrasi pemerintahan bergaya wirausaha, hal ini terlihat dengan adanya pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan sehingga munculnya berbagai inovasi. Inovasi yang dilakukan oleh Desa Cibiru Hilir salah satunya adanya pemangkasan birokrasi dengan penerapan pelayanan berbasis elektronik yang sangat memudahkan masyarakat Desa Cibiru Hilir. Program tersebut merupakan pelayanan Desa berbasis online, hal ini dapat memudahkan aparat desa dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara maksimal. Akan tetapi, perubahan dan perkembangan ini belum terlaksana secara maksimal dalam pelaksanaannya, masih terdapat banyak masalah diantaranya, kerusakan dalam sistem pelayanan menyebabkan masyarakat masih harus mengandalkan proses manual. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya antisipasi terhadap kemungkinan kerusakan sistem, sehingga masyarakat terpaksa menunggu berjam-jam atau bahkan beberapa hari untuk mendapatkan surat yang dibutuhkan. Tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam urusan administratif. Di sisi lain, keluhan masyarakat mengenai kurangnya pelayanan dari aparat desa menegaskan urgensi untuk melakukan perbaikan dalam sistem pelayanan publik.

Sedangkan dalam penelitian terdahulu mengenai "*Entrepreneurial Government* Pada Pemerintahan Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung", temuan menunjukkan bahwa pembangunan akan lebih berhasil jika didukung dengan peran wirausaha baru yang mampu menciptakan lapangan kerja, mengingat kapasitas pemerintah sangat terbatas (Samsu et al, 2023). Studi lain juga mengindikasikan bahwa sistem pemerintahan Indonesia, sebagai demokrasi, mengusung prinsip "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat", sesuai dengan ungkapan yang diatribusikan kepada mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln (Ashshiddiqi et al, 2021).

Temuan dari penelitian terdahulu menegaskan bahwa konsep *entrepreneurial government* memiliki potensi besar sebagai landasan dalam menghadapi tantangan pembangunan di tingkat lokal. Dengan memperkuat peran wirausaha baru dan memastikan bahwa pemerintahan berorientasi pada kepentingan rakyat, diharapkan tercipta pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki penerapan konsep *entrepreneurial government* pada pemerintahan Desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Fokus utama penelitian adalah memahami sejauh mana konsep tersebut telah diterapkan di tingkat desa, mengevaluasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya, dan merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penerapan konsep tersebut.

Metode

Dalam pengumpulan data, berbagai metode dipilih sesuai dengan jenis dan sifat data yang diperlukan untuk memastikan objektivitas. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sebagaimana yang didefinisikan oleh Robert K. Yin, (2006). Menurut Yin, studi kasus merupakan strategi yang tepat untuk mendalami fenomena dalam konteks kehidupan nyata yang tidak selalu jelas secara kasat mata. Dalam penelitian kualitatif, fokus utamanya adalah pada pemahaman mendalam terhadap makna yang terkandung dalam sejumlah individu atau kelompok yang terlibat dalam isu sosial tertentu.

Penelitian ini dilakukan di kantor Desa Cibiru Hilir, yang terletak di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Subjek penelitian terdiri dari staf aktif di Desa Cibiru Hilir, yang memiliki pengetahuan dan wewenang untuk memberikan informasi terkait data yang diperlukan. Data yang digunakan berasal dari dua sumber utama. Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, sedangkan sumber sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung, melalui studi literatur, dokumen, arsip, dan sumber data lain yang relevan. Penelitian ini juga meliputi tahapan analisis data, termasuk reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, atau yang dikenal dengan teknik analisis data interaktif. Terakhir, penulis menggunakan triangulasi data sebagai validitas data (Miles, M. B., & Huberman, 1994).

Hasil dan Pembahasan

Pemikiran untuk mengintegrasikan konsep kewirausahaan ke dalam struktur organisasi publik dianggap sebagai suatu keharusan untuk mengubah paradigma aparatur pemerintah. Tujuannya adalah untuk merubah orientasi birokrasi publik agar lebih proaktif, inovatif, dan mampu mengidentifikasi peluang yang ada. Konsep ini, seperti yang dijelaskan oleh Osborne dan Ted Gaebler (1992) dalam karya mereka, menyarankan bahwa untuk memastikan kinerja optimal dalam pengelolaan sumber daya, birokrasi pemerintah daerah harus mengadopsi prinsip-prinsip yang umumnya diterapkan dalam organisasi bisnis. Oleh karena itu, menjadi penting bagi organisasi pemerintah untuk memiliki semangat atau jiwa kewirausahaan yang sejalan dengan organisasi bisnis.

Istilah "*Entrepreneurial government*" dalam konteks pemerintahan merujuk pada gaya pengelolaan birokrasi pemerintah yang dijalankan dengan semangat kewirausahaan. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan produk atau program yang memiliki nilai tambah dan manfaat yang besar bagi masyarakat. Selain itu, juga bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan standar dari lembaga pemerintah atau organisasi publik dalam menyediakan layanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat secara keseluruhan (Niode, 2014).

Pemahaman mendalam mengenai konsep *Entrepreneurial Government* didapat dari informan B mengemukakan bahwa konsep ini merupakan suatu

perubahan pola pikir untuk memberdayakan dan mengefektifkan sesuatu, memaksimalkan dari batasan-batasan birokrasi yang berkepanjangan, atau sebuah upaya dalam waktu yang singkat tetapi dengan hasil yang maksimal. Jadi pergerakannya ke arah pengembangan dan bukan pemerintah yang murni karena saat ini Desa sudah memiliki kewenangan dengan munculnya suatu aturan, berdasarkan prioritas ataupun kebutuhan masyarakat, dan bagaimana pemerintah harus menanggapi hal itu kemudian mengelola dengan berbagai teknologi atau media-media bentukan usahawan sehingga kita bisa bersaing antara pemerintah, sehingga tidak baku seperti sektor swasta dengan kecepatan dan kekuasaannya. Konsep ini bisa menjadi acuan pemerintah dalam menjalankan suatu roda pemerintahan berdasarkan kebutuhan masyarakat

Setelah melakukan observasi awal, terlihat bahwa penerapan prinsip *entrepreneurial government* di pemerintahan Desa Cibiru Hilir telah cukup baik dalam sistem dan konsep pelayanannya kepada masyarakat. Salah satu contohnya adalah adopsi sistem pelayanan online, meskipun tidak termasuk ke dalam inovasi baru yang diterapkan oleh pemerintah Desa Cibiru Hilir..

Namun fakta di lapangan mengenai penerapan *entrepreneurial government* masih belum dilaksanakan secara maksimal, karena masih muncul kekurangan dalam setiap indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan penerapan *entrepreneurial government* pada pemerintahan. Penelitian ini muncul untuk mengetahui seberapa besar penerapan konsep *entrepreneurial government* pada pemerintahan Desa Cibiru Hilir, dilihat dari konsep *entrepreneurial government* di era modern merupakan hal yang sangat penting diterapkan oleh pemerintah Desa.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan dan mengetahui seberapa besar penerapan konsep *entrepreneurial government* pada pemerintahan Desa Cibiru Hilir, di lihat dari konsep *entrepreneurial government* di era modern yang merupakan hal yang sangat penting diterapkan oleh pemerintahan Desa, karena sebagaimana telah dikemukakan oleh David Osborne dan Ted Gaebler. Dan kondisi pemerintah saat ini telah mengalami perubahan tetapi sifatnya involutif, adanya perubahan tetapi tidak mengalami perubahan yang signifikan, karena masih terjadi patologi birokrasi yang menghambat perubahan menjadi lebih baik.

Dari hasil penelitian *Entrepreneurial government* pada pemerintahan Desa Cibiru Hilir dengan menggunakan teori David Osborne dan Ted Gaebler yang mengungkapkan lima indikator diantaranya, customer oriented, efisiensi dalam penggunaan anggaran, *responsive*, kompetitif, dan inovasi/kreatif, maka dapat di ketahui sebagai berikut:

1. Customer Oriented

Dalam sub pembahasan mengenai konsep *Customer Oriented*, salah satu aspek yang menjadi fokus utama adalah pemberian kebebasan kepada masyarakat untuk memilih penyedia layanan sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. Konsep ini, yang dikenal sebagai *Customer choice*, menegaskan pentingnya memberikan kemudahan akses dan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang berbagai

penyedia layanan. Dengan demikian, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendorong keberadaan sebanyak mungkin penyedia layanan dengan membangun insentif, meningkatkan fasilitas, dan memperjelas informasi mengenai kualitas, biaya, dan waktu layanan. Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta keselarasan antara pelayanan publik dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang lebih luas.

Berdasarkan hasil penelitian mekanisme dan proses orientasi pemerintah Desa Cibiru Hilir terhadap masyarakat yang diterapkan dengan cara mendengarkan keluhan dan aspirasi dari masyarakat. Dalam pengaturan ini, Pemerintah Desa Cibiru Hilir telah menetapkan suatu wadah yang mengatur proses-proses yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang BPD (Badan permusyawaratan Desa) yang salah satu fungsinya menampung keluhan dan aspirasi masyarakat. Yang selanjutnya akan dilakukan musyawarah formal dan informal, musyawarah formal dilakukan pada kegiatan musyawarah dusun dan musyawarah Desa sedangkan musyawarah informal dilakukan melalui grup WhatsApp “sapawarga” yang berfungsi untuk menyalurkan keluhan masyarakat terhadap pemerintah secara langsung. Dan untuk keikutsertaannya pun sudah cukup partisipatif, walaupun tidak seluruh masyarakat namun sudah cukup mewakili masyarakat lainnya.

Adapun dalam program pemberdayaan masyarakat pemerintah Desa Cibiru Hilir mengadakan berbagai program dalam berbagai bidang diantaranya, bidang Pengembangan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Penanggulangan Bencana Darurat. Program-program tersebut menjadi salah satu strategi dan cara pemerintah dalam mengedepankan masyarakat karena untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan masyarakat.

Dalam hal pelayanan, penanganan, pemberdayaan, serta pengelolaan pengaduan dan aspirasi masyarakat yang ditangani oleh Pemerintah Desa Cibiru Hilir, mekanismenya telah berjalan cukup baik dengan dukungan partisipasi masyarakat. Namun, indikator ini belum mencapai tingkat optimal karena terdapat kurangnya upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, sehingga tidak semua warga merasakan manfaatnya. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program-program yang ada, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Hal ini akan membantu memastikan bahwa semua warga merasakan manfaat dari upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Cibiru Hilir.

Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip *customer-oriented* yang terdiri dari tiga kategori: keberadaan mekanisme untuk mendengarkan suara dan keluhan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan publik untuk meningkatkan layanan, dan keberadaan program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Penggunaan anggaran dalam sebuah pemerintahan sudah seharusnya menganut prinsip efisiensi dan efektivitas dalam setiap pengelolaan yang dilakukan dengan cara perencanaan yang tepat guna tercapainya pelayanan yang prima kepada

masyarakat. Di Desa Cibiru Hilir sendiri dalam pengelolaan anggaran sudah cukup efisien, karena dengan adanya penerapan standar dan acuan dari ketentuan peraturan Bupati Bandung Nomor 65 Tahun 2017. Salah satunya dalam bidang pembinaan masyarakat yang terdiri dari pelatihan kader dalam pola asuh anak, pelatihan usaha ekonomi kreatif kepemudaan, dan peningkatan kapasitas lembaga Desa. Sehingga anggaran sudah dalam perencanaan berdasarkan ketentuan penggunaannya. Hal ini telah dirasakan oleh masyarakat Desa Cibiru Hilir karena adanya program pelatihan yang dirasakan oleh masyarakat.

2. Responsive

Penyelenggaraan pemerintahan yang responsif adalah sebuah prinsip yang menuntut tanggapan yang cepat terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini mencakup pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta keterlibatan proaktif dalam mempelajari serta menganalisis setiap kebutuhan tersebut. Dalam konteks pemerintahan Desa Cibiru Hilir, responsivitas menjadi salah satu aspek penting yang menjadi fokus dalam memastikan efektivitas dan kepuasan pelayanan publik bagi masyarakat.

Pembahasan mengenai responsivitas pemerintahan di Desa Cibiru Hilir cukup komprehensif. Dalam konteks ini, responsivitas pemerintahan menjadi aspek penting yang difokuskan untuk memastikan efektivitas dan kepuasan pelayanan publik bagi masyarakat. Penelitian ini menguraikan beberapa aspek penting terkait responsivitas, seperti adanya mekanisme pengaduan dari masyarakat, sikap aparat pemerintah dalam merespon pengaduan tersebut, penggunaan pengaduan masyarakat sebagai referensi untuk perbaikan penyelenggaraan pelayanan, serta proses pengambilan keputusan oleh pemerintah dalam menanggapi pengaduan dan aspirasi masyarakat.

Pada bagian ini, fokus akan diberikan pada analisis mengenai mekanisme pengaduan dari masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun kotak saran tidak lagi digunakan, ada mekanisme alternatif untuk menyampaikan pengaduan, seperti melalui musyawarah dusun dan melalui RT/RW. Walaupun ada perbedaan pendapat di antara informan terkait proses pengaduan, penelitian menunjukkan bahwa terdapat mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka.

Selanjutnya, terkait respon pemerintah, data menunjukkan bahwa respon pemerintah terhadap pengaduan masyarakat telah diatur, meskipun terkadang terhambat oleh keterbatasan anggaran. Namun, pemerintah berusaha memberikan tanggapan yang memadai, walaupun tidak semua pengaduan dapat langsung ditindaklanjuti. Ada upaya untuk membagi peran antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan aparat pemerintah dalam menanggapi pengaduan masyarakat.

Kemudian, terkait penggunaan pengaduan masyarakat sebagai referensi, penelitian menunjukkan bahwa pengaduan masyarakat dijadikan referensi untuk perbaikan penyelenggaraan pelayanan di masa depan. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, hasil wawancara menegaskan bahwa pengaduan masyarakat penting

untuk dijadikan bahan evaluasi dan referensi untuk meningkatkan kinerja pemerintah.

Selanjutnya, dalam konteks proses pengambilan keputusan, meskipun terdapat kendala karena keterbatasan anggaran dan kelambanan pemimpin, pemerintah masih berusaha untuk melakukan proses keputusan berdasarkan Undang-Undang dan musyawarah. Terakhir, terkait tindakan pemerintah dalam memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat, penelitian menunjukkan bahwa pemerintah berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakat, walaupun hal ini tergantung pada ketersediaan anggaran. Ada upaya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat melalui program-program pemberdayaan dan pelatihan.

Penelitian responsivitas pemerintahan di Desa Cibiru Hilir menggambarkan komprehensifnya pendekatan tersebut. Responsivitas pemerintah menjadi fokus utama untuk memastikan efektivitas dan kepuasan pelayanan publik. Mekanisme pengaduan dari masyarakat, seperti melalui musyawarah dusun dan RT/RW, telah menggantikan kotak saran yang tidak lagi digunakan. Pemerintah telah mengatur respon terhadap pengaduan, meskipun kadang terhambat oleh keterbatasan anggaran. Pengaduan masyarakat dijadikan referensi untuk perbaikan pelayanan di masa depan. Kendala pengambilan keputusan, disebabkan oleh anggaran dan kelambanan pemimpin, menjadi tantangan. Namun, pemerintah tetap berupaya memberikan tanggapan yang memadai. Melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan keluhan, yang kemudian ditindaklanjuti secara responsif. Pengaduan masyarakat menjadi evaluasi bagi pemerintah dan menjadi dasar untuk merencanakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Meskipun dalam beberapa kasus tidak dapat langsung diselesaikan secara cepat, karena memperhitungkan kondisi dan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh beberapa pihak, karena berdasarkan peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2016 tentang musyawarah Desa bahwa tujuan musyawarah Desa salah satunya untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Dan hal ini pun terhambat dengan kurang cepatnya pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan.

Pada setiap pengaduan masyarakat akan menjadi sebuah evaluasi pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan menjadikan referensi untuk merencanakan program kedepannya berdasarkan sesuai usulan masyarakat, karena hal ini sudah menjadi prinsip dari Desa Cibiru Hilir itu sendiri dan menjadi salah satu cara atau tindakan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat yaitu dengan memberikan apa yang masyarakat usulkan karena hal ini akan lebih diterima dan bermanfaat untuk masyarakat dibandingkan sesuai dengan keinginan pemerintah.

3. Kompetitif

Kompetitif merupakan suatu kompetisi pemerintah yang diharapkan supaya aparat pemerintahan memiliki semangat juang yang tinggi dalam bekerja, menghargai inovasi, dan dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi dalam

memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Dari hasil penelitian, terungkap bahwa pemerintahan Desa Cibiru Hilir saat ini menonjolkan keunggulan dalam pelayanan dengan mengadopsi dua sistem pelayanan online. Ini telah mengakibatkan peningkatan signifikan dalam kecepatan, efektivitas, dan efisiensi layanan dibandingkan dengan metode offline. Meskipun demikian, keunggulan ini tidak berlaku secara universal bagi semua pemerintah Desa. Informan B menyoroti bahwa peningkatan kecepatan pelayanan tersebut telah mendorong banyak lembaga masyarakat untuk menjadi lebih aktif.

Namun, ada informasi yang menyatakan bahwa keunggulan Desa Cibiru Hilir masih kurang terlihat, terutama dalam hal pelayanan. Informan F bahkan menyatakan bahwa tidak ada keunggulan yang signifikan dalam pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Desa. Meskipun demikian, terdapat keunggulan lain dalam bidang ekonomi, seperti produksi telur asin dan pengembangan kampung batik, yang menjadi ciri khas Desa Cibiru Hilir.

Observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa keunggulan Desa Cibiru Hilir dalam bidang lain, seperti industri makanan, terlihat jelas. Misalnya, telur asin telah menjadi keunggulan dan ciri khas Desa Cibiru Hilir. Namun, dalam hal pelayanan, masih terdapat beberapa kekurangan, terutama terkait dengan sistem pelayanan online yang masih belum sempurna dan rentan terhadap kesalahan teknis. Oleh karena itu, perbaikan dan peningkatan terus menerus diperlukan agar Desa Cibiru Hilir dapat memperoleh keunggulan yang lebih komprehensif, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

Dari tanggapan setiap informan bahwa keunggulan yang dimiliki oleh pemerintah Desa Cibiru Hilir masih kurang terlihat khususnya dalam hal pelayanan, adapun pelayanan pada saat ini masih mengadopsi sistem dari Disdukcapil yaitu yandes yang merupakan sistem pelayanan yang mempermudah aparat pemerintah dalam melayani masyarakat karena sudah terdapat database dan format untuk membuat surat-menyurat yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi hal ini tetap tidak sempurna karena jika terjadi sistem error tidak dapat dipergunakan lagi. Dan setelah peneliti melakukan observasi dan dokumentasi keunggulan dalam bidang lain memang terlihat seperti dalam bidang makanan, yaitu telur asin yang sampai saat ini menjadi keunggulan dan khas Desa Cibiru Hilir dibandingkan kampung bantik.

4. Inovasi dan kreativitas

Inovasi dan kreativitas merupakan suatu bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dapat diukur dengan pengembangan alternatif sumber pelayanan yang dilakukan oleh pemda untuk masyarakat seperti adanya perbaikan kualitas pelayanan, peningkatan efisiensi dan efektivitas. Berdasarkan hasil penelitian saat ini, pemerintah Desa Cibiru Hilir dalam merumuskan berbagai inovasi dan kreativitas berawal dari perencanaan yang akan dirumuskan, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perumusan tersebut, pemerintah Desa Cibiru Hilir belum melaksanakan secara maksimal, salah satunya karena pemerintah Desa sampai saat ini belum mampu menawarkan

pelayanan dengan inovasi dan kreativitas yang baru. Meskipun saat ini telah muncul inovasi pelayanan berbasis online, hal ini tidak cukup karena sistem tersebut masih mengadopsi dari Disdukcapil yang masih memiliki kekurangan dan keterbatasan pemakaian.

Namun, saat ini pemerintah Desa Cibiru Hilir sudah semaksimal mungkin merencanakan dan merumuskan berbagai inovasi untuk memberikan yang terbaik dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat menumbuhkan kemampuan bagi masyarakat sehingga diharapkan masyarakat dapat menumbuhkan inovasi untuk dirinya sendiri dan juga untuk pemerintahan. Walaupun hal ini cukup sulit karena respon masyarakat yang kurang mendukung dan kurangnya pemanfaatan yang diberikan oleh pemerintah.

Untuk saat ini, pemerintah Desa Cibiru Hilir sedang dalam tahap pembuatan rencana strategis dalam setiap kebijakan dan program-program yang akan dijalankan kedepannya, dengan berdasarkan Undang-Undang No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yang di mana pemerintah dituntut untuk menciptakan inovasi atau kreativitas setiap tahunnya. Dalam teori inovasi dan kreativitas dikatakan bahwa hal ini merupakan suatu bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dapat diukur dengan pengembangan alternatif sumber pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelayanan, peningkatan efisiensi, dan efektivitas.



Gambar 1.

Tindakan pemerintah Desa Cibiru Hilir dalam merencanakan inovasi dan kreativitas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sumber: Data ini diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis

Dalam pembahasan mengenai inovasi dan kreativitas, penting untuk dicatat bahwa pemerintah Desa Cibiru Hilir telah mengambil langkah-langkah untuk merumuskan berbagai inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, meskipun upaya tersebut telah dilakukan, hasil

wawancara dan observasi menunjukkan bahwa implementasi inovasi tersebut masih mengalami kendala.

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya respons positif dari masyarakat terhadap inovasi yang diusulkan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Meskipun pemerintah telah berupaya merumuskan inovasi yang dianggap dapat memberikan manfaat, respon yang kurang dari masyarakat membuat implementasi inovasi menjadi sulit dan tidak optimal. Sebagai contoh, informan E menyoroti bahwa meskipun pemerintah telah melakukan upaya merumuskan inovasi, respons masyarakat yang kurang antusias membuat implementasi inovasi menjadi terhambat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun inovasi telah dirumuskan, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu adanya lebih banyak upaya sosialisasi dan pendekatan yang lebih aktif kepada masyarakat. Pemerintah perlu berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat untuk menjelaskan manfaat dari inovasi yang diusulkan, serta mendapatkan masukan dan dukungan dari mereka. Selain itu, pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan dan melaksanakan inovasi juga dapat meningkatkan keberhasilan dan dampak positifnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan konsep *entrepreneurial government* di pemerintahan Desa Cibiru Hilir telah menunjukkan kemajuan, sekalipun telah ada upaya untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi masyarakat melalui berbagai mekanisme, partisipasi dalam kegiatan pelayanan publik, dan program pemberdayaan masyarakat, namun hal ini belum mencapai tingkat optimal karena kurangnya upaya sosialisasi dan respon yang cepat terhadap pengaduan masyarakat. Selain itu, pemerintah Desa Cibiru Hilir juga belum sepenuhnya mampu bersaing secara kompetitif dengan pemerintah Desa lainnya dan belum mampu menciptakan inovasi dan kreativitas yang baru dalam pelayanan publik

Kesimpulan

Dengan merujuk pada temuan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pembahasan sebelumnya mengenai penerapan *entrepreneurial government* pada pemerintahan Desa Cibiru Hilir, dapat peneliti simpulkan bahwa penerapan *entrepreneurial government* pada pemerintah Desa Cibiru Hilir telah adanya penerapan, namun hal ini belum terlaksana secara maksimal karena masih ada kekurangan dari setiap indikatornya. Meskipun demikian, pemerintah Desa Cibiru Hilir telah memahami dan mengetahui bagaimana pentingnya penerapan konsep *entrepreneurial government* di suatu Pemerintahan Desa, meskipun aparat Desa belum berhasil memenuhi ekspektasi yang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Dari kelima indikator yang digunakan dalam penelitian ini beberapa indikator sudah terlaksana dengan baik walaupun belum secara maksimal, masih

ada kekurangan yang harus diperbaiki dalam pengerjaan maupun dalam perencanaan. Salah satu indikator yang masih perlu perhatian yaitu aspek kompetitif yang di mana pemerintah Desa Cibiru Hilir masih belum bisa berfokus pada prinsip-prinsip tersebut dan masih perlu persiapan lebih lanjut untuk meningkatkan daya saing dan keunggulan. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pemerintah Desa Cibiru Hilir segera mengidentifikasi kelemahan yang ada dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaikinya, khususnya dalam hal persiapan dan implementasi prinsip kompetitif. Salah satu kelemahan dalam penelitian ini adalah kurangnya variasi sumber data yang dapat memperkuat temuan penelitian.

Referensi

- Agus Supandi Soegoto, R. E. K. (2017). Entrepreneurial Government Attitude Towards The Performance of Local Government Officials. *ETIKONOMI*, 16(2), 207–220. <https://doi.org/10.15408/etk.v16i2.4968>
- Anwar Sadat. (2022). Entrepreneurial Government and Work Culture on Local Government. *Journal of Governance*, 7(3), 597–607. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31506/jog.v7i3.14444>
- Aryfadi, S. (2020). *Mewirusaha Birokrasi*. Agustus.
- Asri Tandi, Fatmawati, S. R. (2021). Enterpreneur Government Di Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(3), 1039–1054. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Asriadi AR & Mochamat Nurdin. (2016). Strategi Enterpreneurial Government (Pemerintahan Bergaya Wirausaha) Pokok Pikiran Dalam Membangun Kemandirian Desa Di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 7(2), 125–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.47030/administrasita.v7i2.188>
- David Osborne, T. G. (1996). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector* (A. Rosyid (ed.)). Pustaka Binaman Pressindo.
- Fatikha, A. C. (2016). Reinventing Government dan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, VIII, 90–97.
- Hendrawan Prasetyo. (2022). Implementation Of Entrepreneurship-Based Government In The Local Government: Case Study In Kebumen, Indonesia. *Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 160–167. <https://doi.org/10.21831/natapraja.v10i2.54154>
- M. Kafrawi Al- Kafiah Samsu, Yulizar Pramudika Tawil, Risma Ariyani, A. F. (2023). Social Dynamics of Entrepreneurship among Students of the Public Administration Study Program, Tadulako University. *Journal of Public Administration and Government*, 5(1), 107–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.22487/jpag.v5i1.731>
- Mahmud Danil, Akhmad Munjin, G. G. S. (2020). Implementasi Entrepreneurial

- Government di Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor. *Jurnal GOVERNANSI*, 6(1), 17–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jgs.v6i1.1776>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Muhammad Aris, Andi Agustang, A. M. I. (2021). Implementation of Entrepreneurial Government in Makassar City Government. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik*, 11(2), 482–486. <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/jiap.v11i2.30201>
- Muhammad Taufan Ashshiddiqi, Elvira Amelia Nisa, Faizah Ummul Hasanah, Farida Juniar, H. A. P. (2021). Strategi Entrepreneurial Government Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. *KOMITMEN: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 2(2), 57–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jim.v2i2.14380>
- Ngurah Wisnu Murthi. (2023). The Role Of Government And Community In Realizing Socially Entrepreneurial Village-Owned Enterprises (Bum Desa). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 1835–1848. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i12>
- Niode, idris yanto. (2014). Entrepreneurial Government. In *UNG Press*.
- Purnomo, M., & Padjadjaran, U. (2019). *Public Entrepreneurship Dan Organisasi Pemerintah Yang Public Entrepreneurship*. September.
- Riko Fridolend Sianturi, Iskandar Muda, A. S. S. (2023). Analysis of The Influence of Entrepreneurial Leadership, Technical Guidance and Tourism Development on Organizational Commitment and Performance of Village Government in The Lake Toba Area North Sumatra. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 7154–7168. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7170/4967>
- Supriyadi, E. I. (2021). Pergeseran Dalam Paradigma Ilmu Administrasi Publik. *Jurnal RASI*, 3(1), 9–16. <https://doi.org/10.52496/rasi.v3i1.117>
- Ubaidillah, H. (2016). *Membangun Entrepreneur Government Dalam Perubahan Kultur dan Potensi Keirausahaan Masyarakat Di kabupate Abstrak Pendahuluan Dalam upaya merespon dinamika masyaran Sidoarjo*. 143–158.
- Yayat Rukayat Sape'i. (2021). Kombinasi Resiprokal Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Pemerintahan Desa Dengan Konsep Pemerintahan Bergaya Wirausaha. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, 4(1), 180–200. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v4i1.277>
- Yin, R. K. (2006). *Studi kasus : desain dan metode / Robert K. Yin ; penerjemah: M. Djauzi Mudzakir* (Ed.1, Cet.). RajaGrafindo Persada, 2014. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=374741>